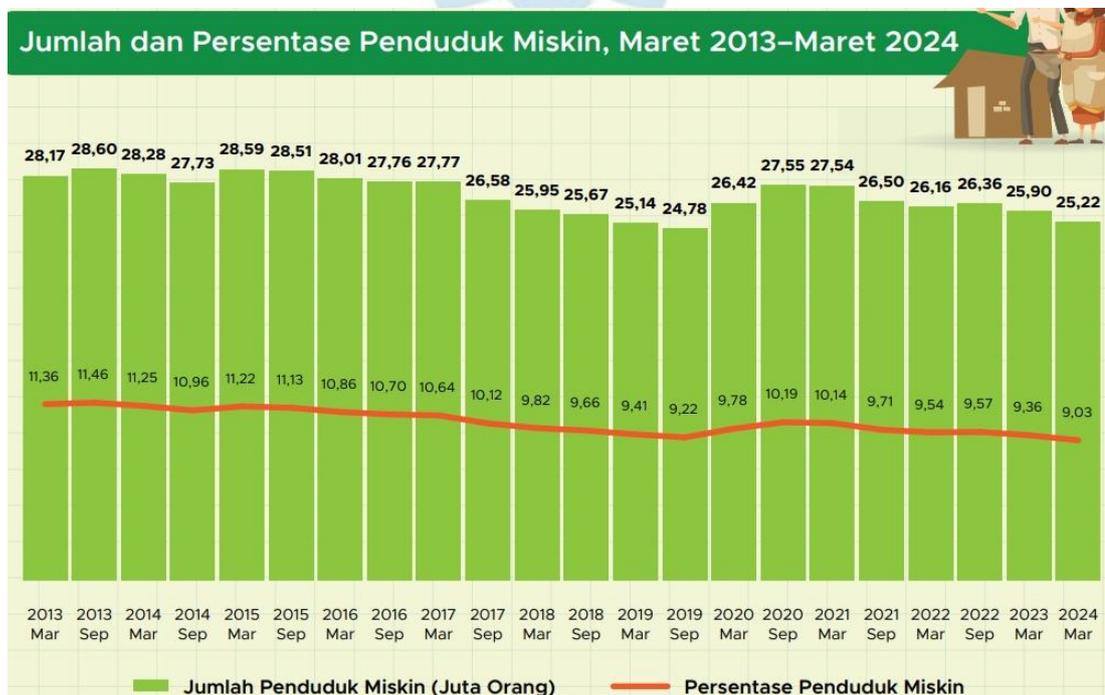


BAB I

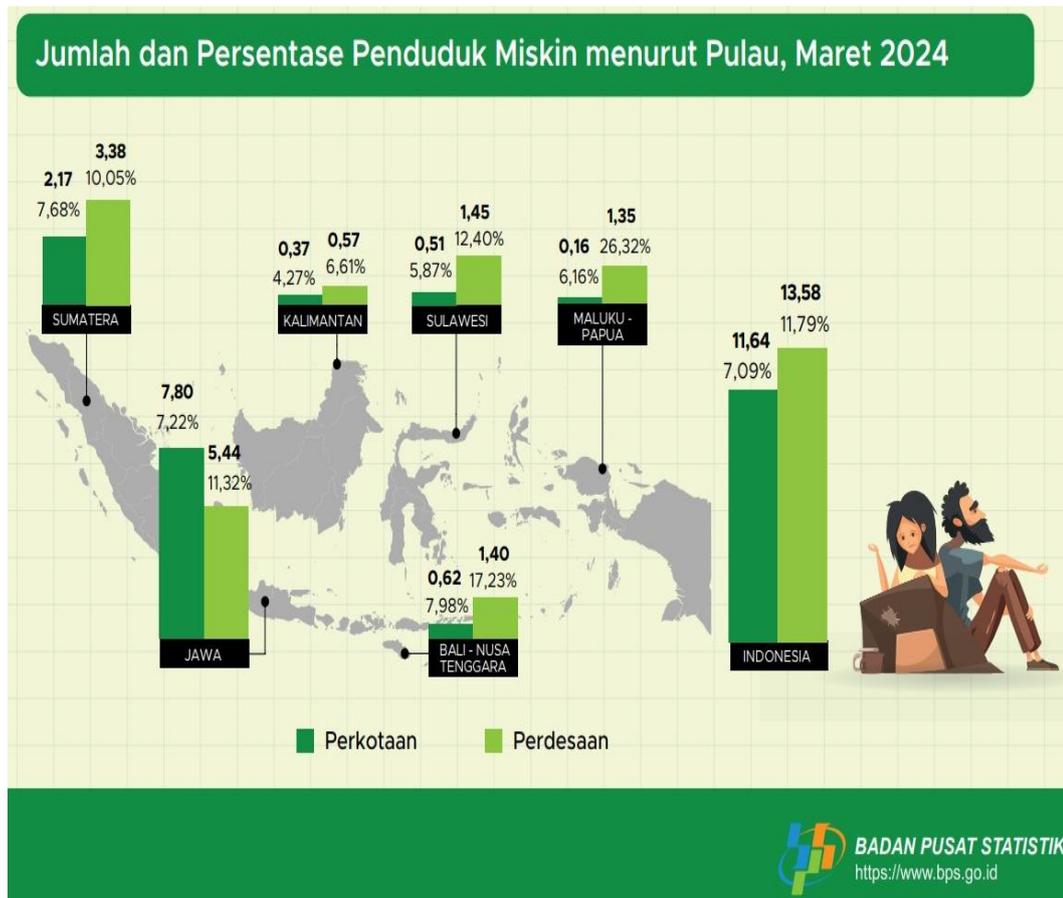
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sering kali ditemukan di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Ketidakkampungan ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disebut sebagai kemiskinan (Mansur, 2024). Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang dan telah menurun sebesar 0,68 juta orang dibanding pada Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024a). Walaupun data tersebut menunjukkan adanya penurunan kemiskinan di Indonesia, tetapi angka kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa di Indonesia angka kemiskinan masih tinggi pada beberapa daerah. Tingginya angka penduduk miskin di Indonesia dapat menimbulkan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pemerintah terus mengeluarkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seperti bantuan dana, makanan, dan lain sebagainya (Krisnawati, 2024).



Gambar 1.1 Data BPS 2024: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Gambar 1.2 Data BPS 2024: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau

Pemberantasan atau pengentasan kemiskinan harus dilakukan agar tidak terjadi kemiskinan ekstrem. Konsep kemiskinan ekstrem ini mengacu pada suatu kondisi dimana adanya keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, fasilitas sanitasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hunian, serta akses informasi. Situasi tersebut tidak semata-mata diukur dari rendahnya penghasilan, namun juga ketidakmampuan menjangkau berbagai layanan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Adapun masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem adalah masyarakat yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan dasar yang tidak lebih dari USD 1,9 berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*) (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022). Dalam mata uang rupiah, nilai tersebut pada tahun 2025 setara dengan tidak lebih dari Rp.30.779

per hari untuk setiap individu. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tugas untuk membuat kebijakan atau program dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Indonesia pada saat ini telah banyak mengeluarkan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan, Program Rumah Tidak Layak Huni, Program Jaminan Sosial, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berbicara mengenai kemiskinan, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masih menjadi masalah yang kompleks untuk diatasi. Berdasarkan data BPS (2024), persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang tahun 2024 sebesar 9,10 persen (Badan Pusat Statistik, 2024b). Jika dilihat dari data tersebut, masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang.

Pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat berbagai program atau kebijakan yang berfokus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program-program tersebut diantaranya Program Kartu Tangkis, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Program Natura. Program Kartu Tangkis merupakan salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sumedang. Pada 3 Juli 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meluncurkan Kartu Tangkis yang berisi *voucher* belanja senilai Rp.75.000 per jiwa setiap bulannya dan diberikan kepada 3.083 Kepala Keluarga yang tergolong miskin ekstrem di Kabupaten Sumedang untuk mengurangi beban kehidupan mereka khususnya dengan membantu memenuhi kebutuhan pangan (Wijaya, 2024).

Program Kartu Tangkis sebenarnya bernama Program Z-Tangkis karena dana yang dikeluarkan berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Program Kartu Tangkis. Program Kartu Tangkis juga telah disosialisasikan oleh BAZNAS. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dana Kartu Tangkis ini berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Infaq tersebut salah satunya dikumpulkan dari

para Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang agar ikut berkontribusi dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun zakat, infaq, dan sedekah merupakan aktivitas keagamaan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial (Anjelina, Salsabila, & Fitriyanti, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan Ekstrem dan Penerima Kartu Tangkis Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara November 2024

Wilayah	Jumlah Penerima Program Kartu Tangkis	Jumlah Kemiskinan Ekstrem
Kecamatan Sumedang Utara	49 KK	113 KK
Desa Girimukti	16 KK	41 KK

Sumber: Data Kecamatan Sumedang Utara (2024)

Salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang yang aktif berkontribusi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin eskترم yakni Kecamatan Sumedang Utara. Penyaluran bantuan dibagikan kepada masyarakat oleh pemerintah secara langsung ke desa-desa di Kecamatan Sumedang Utara yang juga didampingi pihak Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil pra-survey, Kecamatan Sumedang Utara memiliki 10 kecamatan dan data kemiskinan ekstrem terbanyak di Kecamatan Sumedang Utara berada di Desa Girimukti. Jumlah kemiskinan ekstrem di Kecamatan Sumedang Utara sebanyak 113 KK, sementara di Desa Girimukti sendiri terdapat 41 KK yang berkategori miskin ekstrem. Kemudian jumlah penerima Program Kartu Tangkis di Kecamatan Sumedang Utara sebanyak 49 KK, sementara di Desa Girimukti sebanyak 16 KK. Masyarakat penerima Program Kartu Tangkis merupakan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrem.

Berdasarkan hasil penelitian Ainil Farhani (2023), strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ialah dirancangnya berbagai program atau kebijakan untuk meminimalisir dampak dari kemiskinan ekstrem sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat

(Farhani, 2023). Selain itu, hasil penelitian dari Putri Wulan Agustina, Kiky Asmara dan Arief Bachtiar (2023) mengatakan bahwa Program Bantuan Rumah Swadaya memberikan pengaruh yang sangat baik serta positif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya (Agustina, Asmara, & Bachtiar, 2023). Maka dari itu, kebijakan ataupun program bantuan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, baik berupa bantuan tunai ataupun non tunai.

Selaras dengan hasil penelitian di atas, Program Kartu Tangkis bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Namun pada realitasnya, program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah ternyata dapat menimbulkan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat khususnya penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Maka dari itu, penting untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan sehingga dapat memaksimalkan tujuan yang diharapkan baik oleh pemerintah atau masyarakat.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Merton mengemukakan teori struktural fungsional dimana pemikirannya berfokus pada konsekuensi atau dampak obyektif dari suatu struktur. Selain itu, Merton juga mengemukakan 2 konsep fungsi yaitu fungsi manifes dan fungsi laten (Raho, 2021). Sehingga teori Struktural Fungsional ini dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis berbagai dinamika seperti keadilan distribusi atau dampak yang terjadi akibat adanya Program Kartu Tangkis terhadap kemiskinan ekstrem di masyarakat.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan di atas, telah banyak penelitian yang mengkaji tentang dampak program bantuan sosial lainnya, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), namun belum ada penelitian yang mengkaji dampak Program Kartu Tangkis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan berfokus pada bantuan sosial melalui Program Kartu Tangkis (Tangkal Kemiskinan) dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Dinamika bantuan sosial yang terjadi melalui Program Kartu Tangkis terhadap kemiskinan ekstrem perlu dikaji secara lebih mendalam. Dimana penelitian ini akan mengkaji mengenai praktik penyaluran

Program Kartu Tangkis yang mencerminkan ketimpangan dan upaya keadilan sosial pada masyarakat miskin ekstrem, perubahan ekonomi masyarakat miskin ekstrem setelah menerima Program Kartu Tangkis serta dampak negatif yang timbul pada masyarakat setelah adanya Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “BANTUAN SOSIAL MELALUI PROGRAM KARTU TANGKIS DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM (PENELITIAN DI DESA GIRIMUKTI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, berikut rumusan masalah yang dibuat untuk membatasi penelitian ini:

1. Bagaimana praktik penyaluran Program Kartu Tangkis yang mencerminkan ketimpangan dan upaya keadilan sosial pada masyarakat miskin ekstrem di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana perubahan ekonomi masyarakat miskin ekstrem setelah menerima Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana dampak negatif yang timbul di masyarakat setelah adanya Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran Program Kartu Tangkis yang mencerminkan ketimpangan dan upaya keadilan sosial pada masyarakat

miskin ekstrem di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui perubahan ekonomi masyarakat miskin ekstrem setelah menerima Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dampak negatif yang timbul di masyarakat setelah adanya Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, berikut beberapa manfaat yang terdiri dari:

1. Kegunaan Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam pengembangan teori-teori dan ilmu pengetahuan terkait kemiskinan ekstrem, khususnya dalam konteks program bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta meningkatkan pemahaman dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan atau referensi di kalangan akademisi, khususnya penelitian yang berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi di daerah pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah serta pembuat kebijakan dalam merancang dan melaksanakan program-program bantuan sosial yang lebih sesuai dan tepat sasaran. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki Program Kartu Tangkis agar lebih efektif dalam menangani kemiskinan ekstrem. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

program-program pemerintah serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi, namun dapat dikurangi dengan berbagai upaya. Program Kartu Tangkis merupakan salah satu program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk masyarakat miskin yang berkategori miskin ekstrem. Kata “Tangkis” merupakan singkatan dari “Tangkal Kemiskinan”. Dana Program Kartu Tangkis ini berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sumedang dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, kemiskinan ekstrem mengacu pada suatu kondisi masyarakat dimana adanya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, fasilitas sanitasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hunian, serta akses informasi. Situasi tersebut tidak semata-mata diukur dari rendahnya penghasilan, namun juga keterbatasan menjangkau berbagai layanan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Selain itu, masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrem adalah masyarakat yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan dasar yang tidak lebih dari USD 1,9 berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*) (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022). Dalam mata uang rupiah, nilai tersebut pada tahun 2025 setara dengan tidak lebih dari Rp. 30.779 per hari untuk setiap individu. Dalam mengkaji bantuan sosial melalui Program Kartu Tangkis dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, konsep kemiskinan ekstrem yang telah dipaparkan sebelumnya yakni penghasilan kurang dari Rp.30.779/orang/hari, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta keterbatasan pada akses layanan sosial dapat dijadikan indikator dalam menganalisis perubahan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

Selaras dengan pemaparan sebelumnya, penting untuk dilakukan penelitian mengenai dampak Program Kartu Tangkis di Kabupaten Sumedang, khususnya di daerah yang memiliki cukup banyak masyarakat berkategori miskin ekstrem. Salah satu daerah tersebut adalah Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara yang masyarakatnya tergolong banyak berkategori miskin ekstrem dan beberapa diantaranya merupakan penerima Program Kartu Tangkis. Hal ini perlu dikaji dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Desa Girimukti agar dapat mengevaluasi program tersebut menjadi lebih baik, efektif dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan juga masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi program-program yang dapat mempengaruhi hidup mereka sendiri.

Teori yang relevan dalam mengkaji dampak Program Kartu Tangkis terhadap kemiskinan ekstrem di Desa Girimukti yakni teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Robert King Merton. Robert K. Merton mengemukakan teori struktural fungsional dimana pemikirannya berfokus pada konsekuensi atau dampak obyektif, dimana struktur dapat memberikan konsekuensi positif atau negatif bagi suatu sistem. Merton juga mengemukakan 2 konsep fungsi yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes yaitu fungsi yang diharapkan, biasanya dinyatakan sebagai tujuan yang dimaksud oleh kelompok atau individu. Sementara fungsi laten yaitu fungsi yang tidak direncanakan atau tersembunyi dimana konsekuensi dari suatu tindakan dapat fungsional atau disfungsional (Raho, 2021).

Program Kartu Tangkis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sebagai struktur yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap suatu sistem yakni masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Girimukti. Adapun fungsi manifes dari Program Kartu Tangkis yakni mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang. Sementara fungsi laten dari Program Kartu Tangkis yakni dampak yang belum diketahui baik itu dampak positif atau dampak negatif di masyarakat yang dapat timbul dari adanya Program Kartu Tangkis di Desa Girimukti. Sehingga pada penelitian ini, Program Kartu Tangkis dapat menjadi fungsional atau disfungsional dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.



Gambar 1.3 Skema Konseptual

